

KAJIAN PENGEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN DI KABUPATEN SAMBAS PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Sumar'in *¹

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia
sumarinasmawi@gmail.com

Reo Zaputra

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

Abstract

The fisheries sector should be a mainstay in Indonesia's development, because so far the fisheries sector is considered to have been proven as a sector that is able to survive in critical situations and is able to provide food (a source of fish protein) for the community, a source of income, and at the same time absorb a large number of workers. . Meanwhile, Sambas Regency has one sub-district which is considered a central place for trading and catching marine fish, namely the Pemangkat sub-district which must be developed. The type of research used is descriptive research and library research. Based on the results of data analysis and discussion, it can be concluded that in carrying out regional government development, including in the fisheries sector, it should prioritize moral and justice aspects. Because creating prosperity in society is the obligation of all economic agents.

Keywords: Economic Development, Fisheries and Base Sector.

Abstrak

Sektor perikanan seharusnya menjadi andalan dalam pembangunan Indonesia, karena selama ini sektor perikanan dianggap telah teruji sebagai sektor yang mampu bertahan dalam situasi kritis dan mampu menyediakan bahan pangan (sumber protein ikan) bagi masyarakat, sumber pendapatan, serta sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Adapun Kabupaten Sambas memiliki satu kecamatan yang dianggap sebagai sentral tempat perdagangan dan penangkapan ikan-ikan laut yaitu kecamatan Pemangkat yang harus di kembangkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif (*descriptive reasearch*) dan penelitian kepustakaan (*lebrary reasearch*). Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan dalam menjalankan pembangunan pemerintah daerah termasuk pada sektor perikanan hendaknya mengedepankan aspek moral dan keadilan. Karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi.

Keywords: Economic Development, Fisheries and Base Sector.

¹ Korespondensi Penulis.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 2/3 bagiannya adalah lautan. Lautan di Indonesia memiliki panjang garis pantai mencapai 95.000 km persegi. Ditambah lagi dengan luas hamparan terumbu karang sebesar 24,5 juta Ha. Selain dari panjang garis pantai dan luas terumbu karang, Indonesia juga masih menyimpan potensi kelautan lainnya (Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, 2002).

Visi Presiden tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Kabupaten Sambas merupakan salah satu dari sembilan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 6.395,7 km² atau 639.570 Ha, dengan panjang pantai 198,76 km dan panjang perbatasan Negara kurang lebih 97 km. Batas wilayah di sebelah Utara dengan Serawak (Malaysia Timur) sebelah Selatan Kota Singkawang, sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkayang dan sebelah Barat dengan Laut Natuna. Selain itu, Kabupaten Sambas memiliki 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan total hamparan 516.200 Ha, meliputi: DAS Paloh 64.375 Ha, DAS Sambas 258.700 Ha, DAS. Sebangkau 193.125 Ha dan nilai produksi perikanan laut tahun 2020 sebesar 434,7 Miliyar (www.sambas.go.id). Potensi ini menunjukkan bahwa cukup besar ketergantungan masyarakat wilayah tersebut terhadap sumber daya pesisir dan usaha pada sektor perikanan.

Bupati Sambas mengatakan bahwa kabupaten yang terletak di bagian pantai barat paling utara yang berbatasan dengan Malaysia Timur (Sarawak) dan Laut Natuna itu, memiliki sejumlah potensi ekonomi yang bisa dikembangkan terutama dari sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Karena secara geografis, sumber daya alam, dan budaya, ketiga sektor tersebut di Kabupaten Sambas memiliki keunggulan komperatif untuk dikelola dan diolah secara kompetitif. Menurut dia, seluruh potensi tersebut harus digarap dengan maksimal, agar pada saat bersamaan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar (<https://money.kompas.com>).

Kabupaten Sambas memiliki satu kecamatan yang dianggap sebagai sentral tempat perdagangan dan penangkapan ikan-ikan laut. Pusat perikanan dan kelautan di Kabupaten Sambas tersebut terletak di Kecamatan Pemangkat yang letaknya berada di dalam Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat Desa Penjajab Barat (<https://dislautkan.kalbarprov.go.id>). Maka dari itu, tempat inilah yang akan menjadi fokus penelitian untuk melihat secara langsung bagaimana pengelolaan potensi sub-sektor perikanan (perikanan tangkap) yang ada di sentral perikanan wilayah

Kabupaten Sambas dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Sambas ini.

Sektor perikanan seharusnya menjadi andalan dalam pembangunan Indonesia, karena selama ini sektor perikanan dianggap telah teruji sebagai sektor yang mampu bertahan dalam situasi kritis dan mampu menyediakan bahan pangan (sumber protein ikan) bagi masyarakat, sumber pendapatan, serta sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar (Apriliani, Karina F. 2014).

Berdasarkan UU No. 31 tahun 2004 pasal 1 tentang perikanan menyatakan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan. Sektor perikanan mempunyai dua kegiatan yaitu penangkapan ikan, dan budidaya ikan. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengolah, dan atau mengawetkan. Sedangkan budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol (Pasal 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang *Perikanan*).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 nilai PDRB untuk sektor perikanan di wilayah Kabupaten Sambas yaitu 598,75 miliar rupiah meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai nilai 574,67 miliar rupiah untuk tahun 2018 dan 568,02 miliar rupiah untuk tahun 2017. Sedangkan untuk hasil produksi perikanan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 di wilayah Kabupaten Sambas mencapai 21.741,26 ton atau meningkat 56,04 persen dibanding tahun sebelumnya (BPS, 2020). Hal ini bisa dilihat pada tabel 1. berikut:

Tabel 1.
Angka Produksi Perikanan (dalam ton) di Wilayah Kabupaten Sambas dari tahun 2015-2019

Subsektor Perikanan	Produksi Perikanan (dalam ton)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Perikanan Laut	41028,00	45013,38	6326,04	5890,75	13500,25
Perairan Umum	683,66	795,43	121,05	139,14	153,73
Budidaya	6331,48	5838,88	6980,45	7903,23	8105,28
Jumlah	48043,14	51647,69	13427,54	13933,12	21741,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas tahun 2019

Pada tabel 1 menunjukkan jumlah produksi perikanan laut dan budidaya di wilayah Kabupaten Sambas cenderung meningkat setiap tahunnya, walaupun pada perairan umum mengalami penurunan, akan tetapi hal itu tidak berpengaruh besar

karena pada perairan umum tidak banyak diminati oleh masyarakat Kabupaten Sambas. Hal ini berbeda dengan perikanan laut yang kebanyakan dijadikan mata pencarian sehari-hari yaitu dengan menjadi nelayan.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, peneliti melihat bahwa banyak potensi sumber daya perikanan yang belum dimanfaatkan secara maksimal seperti adanya dua pelabuhan perikanan di Kabupaten Sambas, banyaknya daerah di Kabupaten Sambas yang berada di daerah pesisir tapi harga ikan masih tergolong mahal, adanya tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Sambas tapi jarang ditemui masyarakat yang membudidayakan ikan baik menggunakan Keramba Jaring Tancap (KJT) maupun Keramba Jaring Apung (KJA), serta Kabupaten Sambas yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tapi belum ada kegiatan ekspor hasil perikanan dari Kabupaten Sambas ke Negara tetangga.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peranan sektor perikanan dan kelautan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung termasuk kedalam sektor basis ekonomi hal ini dikarenakan nilai analisis *Location Quotient* (LQ) sebesar 1,0516. Adapun nilai LQ 1 atau > 1 menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis ekonomi atau sektor unggulan di wilayah tersebut dan sektor perikanan di wilayah ini mampu memenuhi kebutuhan lokal maupun mampu mengekspor ke daerah lain. Hal ini juga, dalam perspektif ekonomi islam pemerintah daerah tersebut mampu menjalankan pembangunan ekonomi dengan mengedepankan aspek moral dan keadilan sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut (Andri Wijaya, 2019).

Sedangkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika dengan menggunakan analisis SWOT, bahwa faktor- faktor internal yang menjadi kekuatan sumberdaya perikanan adalah faktor tingkat produksi nelayan yang cukup baik, peranan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat baik, hubungan dengan pembeli sangat baik, kondisi perairan dengan habitat ikan sangat baik, dan manajemen sumberdaya perikanan cukup baik. Faktor internal yang menjadi kelemahan sumber daya perikanan di wilayah tersebut yaitu lingkungan usaha sangat terbatas, serta sarana dan prasarana yang dimiliki sangat terbatas. Faktor eksternal yang menjadi peluang bagi masyarakat nelayan di wilayah tersebut adalah faktor tidak adanya pesaing dari luar daerah, dan adanya program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Erwin, Leonardus Tumuka, 2018).

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam peningkatan mutu sektor perikanan antara lain adalah masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dari pemerintah, masih kurangnya modal dan perlunya adanya penyuluhan secara rutin kepada masyarakat nelayan yang ada di wilayah pesisir, belum dimilikinya sistem dan prosedur pelaksanaan kegiatan pengembangan sektor perikanan yang efektif dan efisien agar hasil produksi meningkat lebih banyak dari tahun ke tahun untuk menopang PDRB tersebut dalam pembangunan ekonomi wilayah. Penelitian ini melihat dan menganalisis

kebijakan sektor perikanan dalam pertumbuhan ekonomi wilayah dalam perspektif ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif (*descriptive reasearch*) dan penelitian kepustakaan (*lebrary reasearch*). Hidayat Syah mengemukakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu (Hidayat Syah, 2010). Sedangkan Punaji Setyosari menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata (Punaji Setyosari, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan sub-sektor perikanan tangkap, harus berlandaskan dengan asas kerjasama. Bahwa sumber daya alam yang diberikan oleh Allah adalah untuk pemenuhan kebutuhan manusia, bukan untuk dikuasai oleh beberapa orang. Islam mengedepankan bahwa kerjasama jauh lebih baik daripada persaingan, dan menjaga ekosistem perikanan tangkap sesuai dengan konsep bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama. Hal ini juga disampaikan oleh Caincross dalam Jhingan yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi bukanlah sekadar masalah memiliki sejumlah besar uang atau semata-mata fenomena ekonomi, akan tetapi mencakup semua aspek perilaku masyarakat, penegakan hukum dan ketertiban, kecermatan dalam hubungan bisnis, termasuk hubungan dengan instansi yang berkaitan dengan penerimaan negara, hubungan antara keluarga, buta huruf, keakraban dengan mperalatan mekanis, dan sebagainya (Jhingan, M.L. 1993).

Selanjutnya, konsep pertumbuhan ekonomi menurut Baek dan Laily tidak hanya berhubungan dengan peningkatan volume barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhwari. Intinya tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat dari pencapaian materi semata, melainkan sisi perbaikan agama, sosial dan kemasyarakatan.

Hal itu menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam terutama sektor perikanan harus mengedepankan prinsip persaudaraan daripada persaingan. Dengan mengedepankan prinsip persaudaraan, maka akan berimplikasi terhadap tanggung jawab bersama dalam pengentasan kemiskinan, terutama membantu mengentaskan kemiskinan saudara sesama muslim.

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka *Hifdzul Bilah*, Islam menganjurkan untuk menyelamatkan spesies, memanfaatkan, dan memperlakukan semua makhluk Allah secara bijaksana. Islam mengajarkan bahwa

untuk mewujudkan negeri yang makmur harus memenuhi tiga prioritas yang harus dikelola secara optimal, yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, serta kedaulatan konservasi. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah QS. An-Nahl [16] ayat 14, sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ
مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahannya:

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014).

Mengelola sumber daya kelautan, Islam mengajarkan menggunakan standar perlakuan terbaik (*Ihsan*). Allah sangat menyukai manusia yang menjalankan *Ihsan* terhadap sesuatu. Perlakuan terbaik yang dimaksud adalah tidak berlaku berlebihan, memenuhi unsur keadilan dan persaudaraan.

Hal ini karena Beik dan Laily pandangan hidup islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, diantaranya *tauhid*, *khilafah*, dan *tazkiyah*. Akan tetapi, hal berbeda diungkapkan oleh Huda dkk, bahwa dasar-dasar filosofis pembangunan ekonomi islam adalah *tauhid*, *khalifah*, keadilan dan *tazkiyah*. Penjelasan ide fundamental tersebut bisa dilihat pada tabel 16 berikut:

Tabel 15. Ide Fundamental Pembangunan Ekonomi Islam

Beik dan Laily	Nurul Huda dkk
- <i>Tauhid</i> Segala aktifitas pembangunan ekonomi didasarkan pada ketundukan kepada aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. - <i>Khalifah</i> Manusia merupakan wakil Allah di bumi, dan bertugas untuk memakmurkan bumi. - <i>Tazkiyah</i> Pembangunan yang dilakukan dalam rangka tazkiyah, merupakan kerangka jalan yang	- <i>Tauhid</i> Manusia diperintahkan mengamati dan memahami segala fenomena alam, sebagai salah satu bukti kebenaran Al Qur'an dan keberadaan Allah SWT. - <i>Khalifah</i> Manusia merupakan wakil Allah SWT. di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan bertanggung jawab kepada Allah SWT. tentang pengelolaan

didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu keadilan, keseimbangan, dan ketundukan penuh terhadap aturan Allah SWT.	sumber daya yang diamanahkan kepadanya. - Keadilan Berarti pembangunan yang merata, dimana persaudaraan umat manusia hanya akan berjalan jika dibarengi dengan konsep keadilan. - Tazkiyah Tazkiyah merupakan penyucian manusia dalam segala hubungan dengan Allah (<i>hablum minallah</i>) dengan sesama manusia (<i>hablum minannas</i>), dengan lingkungan alamnya (<i>hablum minal alam</i>) dan lingkungan masyarakat serta negerinya.
--	---

Diolah dari berbagai sumber

Kegiatan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam menunjukkan bahwa manusia cenderung berlebihan. Dalam ekonomi konvensional, prinsip ekonomi menjelaskan bahwa manusia berusaha untuk mendapatkan sumber daya dengan maksimal dengan usaha yang minimal, sedangkan dalam Islam, Allah SWT berfirman bahwa manusia tidak boleh berlebih-lebihan.

Efisiensi terhadap sumber daya alam sangat penting terhadap sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dikarenakan dengan meningkatnya eksploitasi sumber daya alam tersebut maka kerusakan sumber daya alam menjadi tidak dapat diperbaharui, kecuali dengan biaya yang sangat tinggi.

Sektor perikanan di Indonesia saat ini lebih mengedepankan keinginan untuk mendapatkan hasil maksimal tanpa memikirkan resiko dari akibat penangkapan ikan berlebih dan *illegal fishing* yang mengakibatkan berkurangnya spesies ikan tertentu. Sehingga akan mengurangi jumlah spesies ikan yang berada di perairan Indonesia. Resiko selanjutnya adalah dengan penangkapan berlebih, akan mengakibatkan terganggunya rantai makanan di perairan yang menjadikan tidak seimbang ekosistem.

Illegal fishing juga menyebabkan kerusakan ekosistem, terutama terumbu karang. Kerusakan terumbu karang akan menyebabkan berkurangnya jumlah ikan yang berada di perairan dikarenakan terumbu karang merupakan lingkungan utama untuk ikan berlindung serta mencari makan. Rusaknya terumbu karang juga menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir, hal tersebut merupakan dampak hilangnya penahan ombak yang merupakan salah satu fungsi dari terumbu karang.

Kebijakan pemerintah saat ini telah sesuai dengan ajaran Islam, dimana Islam menganjurkan untuk menjaga alam serta tidak merusaknya. Kemudian pemerintah menjaga jumlah dan ancaman perikanan tangkap di perairan Indonesia dari *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* nelayan asing, sehingga menyebabkan kerugian bagi ekonomi Indonesia. Kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah, pada kenyataannya belum terimplementasikan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya nelayan yang menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem untuk meningkatkan hasil tangkapan yang pada akhirnya akan merugikan nelayan serta berdampak pada menurunnya kontribusi sektor perikanan tangkap bagi perekonomian. Kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* yang banyak dilakukan oleh nelayan asing, disebabkan oleh luasnya laut Indonesia serta kurangnya SDM dan pengawasan laut. Sehingga laut Indonesia menjadi sasaran penangkapan ikan bagi nelayan asing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan dalam menjalankan pembangunan pemerintah daerah termasuk pada sektor perikanan hendaknya mengedepankan aspek moral dan keadilan. Karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Pembangunan wilayah yang ada di Kabupaten Sambas tidak lepas dari peran pemerintah yang ikut dalam proses pembangunan sekarang. Kesejahteraan ekonomi termasuk nelayan merupakan hasil dari seluruh elemen yang ada di masyarakat, baik pemerintah, keluarga maupun masyarakat itu sendiri. Begitu pula dengan menciptakan keadilan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun kewajiban masyarakat juga. Sesuai dengan prinsip keadilan dalam pembangunan ekonomi islam yaitu, dalam sesuatu berdasarkan hak dan kewajiban dan tanggung jawab itu harus merata, adil dan berguna bagi masyarakat semuanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, (2005), *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Raharjo, (2006), *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adisasmita, Rahardjo, (2014), *Pertumbuhan Wilayah & Wilayah Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Asyari, Sapari Imam, (1983), *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Arikunto, Suharsimi, (1993), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi II. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin, (1993), *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Arsyad, Lincolin, (1999), *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Dahuri, Rokhmin dan Iwan Nugroho. (2012), *Pembangunan Wilayah: Perpektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.

- F, Apriliani Karina, (2014), "Analisis Potensi Lokal di Wilayah Pesisir Kabupaten Kendal Dalam Upaya Mewujudkan Blue Economy." *Economics Development Analysis Journal*, April, hlm. 60.
- Glasson, Jhon. (1990), *Pengantar Perencanaan Regional*, Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta : LPFEUI.
- Hisyam, M.S, (1998), *Analisa SWOT Sebagai Langkah Awal Perencanaan Usaha*, Makalah. Jakarta: SEM Institute
- Huda, Nurul dkk. (2015), *Ekonomi Pembangunan Islam*, Cetakan ke-1. Jakarta: Prenada Media Group.
- Itang, (2015). *Teori Ekonomi Islam*. Jakarta: Laksita Indonesia.
- Janwari, Yadi, (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, (2014), *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Suara Agung.
- Kuncoro, Mudrajat, (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Airlangga.
- Mahyudin, Ahmad, (2004), *Ekonomi Pembangunan Dan Analisis Data Empiris*. Bojongsuka: Ghalia Indonesia.
- Mary, Coulten & Robbins Stephen P, (2009), *Manajemen Eight Edition*. Jakarta : PT. Indeks.
- M. L, Jhingan, (2008), *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Ngamel, Anna Kartika, (2004), "Peran Sektor Kelautan Dan Perikanan Terhadap Pembangunan Wilayahkabupaten Maluku Tenggara, provinsi Maluku tenggara". Online. Skripsi: Institut Pertanian Bogor. Diakses tanggal 02 November 2021
- Pratama, Cahya Dicky, (2020), *Indikator Keberhasilan Pembangunan Ekonomi*, (Online). www.kompas.com. (Diakses tanggal 05 Desember)
- Qardhawi, Yusuf, (1997). *Peran Nilai dan Moral Dalam perekonomian Islam*, Penerjemah Didin Hafidhuddin. Jakarta: PT. Robbani Press.
- Ramli, "Maksimalkan Potensi Daerah, Sambas Siap Gelar Karpas Merah Ke Investor", (Online). <https://money.kompas.com>. (diakses tanggal 02 November 2021)
- Richardson, Harry W, (2001), *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*, Terjemahan Paul Sitohang, Edisi Revisi. Jakarta: Lembaga FE UI.
- Samsu, (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi*. Jambi: Pusaka Jambi.
- Setyosari, Punaji, (2010). *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana.
- Sirojuzilam. *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wliyah Timur Provinsi Sulawesi Utara*. (Sulawesi utara: Pustaka Bangsa Press, 2008),
- Siska, (2018), "Analisis Sektor Basis dan Non Basis Perekonomian di Kabupaten Bone". *Skripsi Program Sarjana Ekonomi*. Makasar: UIN Aluddin.
- Sjafrizal, (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sugiono, (2017), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (1985), *Ekonomi Pembangunan; Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, LP3ESUI. Jakarta: Bina Grafika.
- Suyatno. (2000), *Analisa Econimic Base Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tingkat II ,Wonogiri : Menghadapi Implementasi UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999. Dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan UMS Surakarta*, Vol. 1. No. 2. hlm. 144.
- Syah, Hidayat, (2010), *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*. Peka baru: Suska Pres.
- Tambunan, Tulus, (2001), *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Taringan, Robinson, (2005), *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Tumuka Leonardus, Erwin, (2014), *“Analisis Potensi Sumberdaya Perikanan Wilayah Pesisir Dalam Menunjang Kesejahteraan Nelayan Di Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika”*. *Jurnal Kritis Volume II*, No 1. hlm 24.
- Wardoyo, Paulus, (2011), *Enam Alat Analisis Manajemen*. Semarang: University Press.
- Wijaya Andri, (2019), *”Analisis Peranan Sektor Perikanan Dan Kelautan Terhadap Pembangunan Wilayah dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten Pesisir Barat)”*. Skripsi pada Universitas Islam Raden Intan Lampung.
- Zainuddin, Moch, (2017), *Pertumbuhan Ekonomi dalam Prespektif Ekonomi Islam*. Jurnal: STAIN Kediri.